

**STUDI PEMBANGUNAN DAN PERTUMBUHAN
EKONOMI SUMATERA UTARA**

Oleh :

Mardiana, S.E



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS EKONOMI
MEDAN
2003**

STUDI PEMBANGUNAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI SUMATERA UTARA

Oleh :

Mardiana, S.E



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS EKONOMI
M E D A N
2 0 0 3**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmatNya, sehingga penulisan hasil studi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Hasil studi yang berjudul "Studi Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara" ini, mengkaji tentang hasil-hasil pembangunan sosial dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi di Sumatera Utara. Semoga hasil studi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya serta masyarakat luas secara umum.

Disadari bahwa hasil studi ini masih jauh dari sempurna, karena berbagai keterbatasan yang ada. Selain itu diharapkan para pembaca mau secara ikhlas memberikan kritik dan saran untuk kesempurnaan studi-studi di kemudian hari.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu, yang namanya tidak tercantum dalam tulisan, semoga segala bentuk kebaikan yang telah diberikan mendapat ganjaran yang berlipat ganda dari Allah SWT. Ammin.

Medan, Agustus 2003

Penulis

Mardiana, S.E

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB	
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Studi	8
1.3 Manfaat Studi	8
1.4 Ruang Lingkup Studi	8
1.5 Jenis dan Sumber Data	8
1.6 Metode Analisis	9
II KONSEP-KONSEP PEMBANGUNAN	10
2.1 Konsep Pembangunan Ekonomi	10
2.2 Pembangunan Di Negara Sedang Membangun	10
2.3 Kebijakan Pembangunan Di Indonesia	13
2.4 Pembangunan Ekonomi dan Pengembangan Potensi Daerah	16
III HASIL PEMBANGUNAN SOSIAL SUMATERA UTARA	24
3.1 Kondisi Geografis	24
3.2 Kondisi Kependudukan	25
3.3 Kondisi Ketenagakerjaan	28
3.4 Kondisi Pendidikan	31
3.5 Kondisi Kemiskinan	34
IV HASIL PEMBANGUNAN EKONOMI SUMATERA UTARA	36
V. KESIMPULAN	41
DAFTAR KEPUSTAKAAN	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses yang terus menerus dilaksanakan, melalui suatu perencanaan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek. Satu aspek yang penting dalam pembangunan tersebut adalah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dipandang sebagai suatu proses dimana adanya saling keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembangunan ekonomi tersebut. Sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk perencanaan pembangunan ekonomi selanjutnya, guna mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat.

Umumnya pembangunan nasional di negara-negara yang sedang membangun difokuskan pada pembangunan ekonomi melalui usaha pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa. Pada akhirnya tujuan pembangunan ekonomi nasional dan daerah adalah untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, mencapai stabilitas perekonomian daerah, dan untuk membangun basis kesempatan yang beraneka ragam (Jamli 1996).

Pembangunan nasional mempunyai dampak atas pembangunan daerah, sebab daerah adalah bagian internal dari suatu negara kesatuan, dimana rencana pembangunan meliputi rencana nasional maupun rencana regional (daerah). Pembangunan (ekonomi) nasional mempunyai dampak atas struktur ekonomi daerah (Soepono, 1993).

Proses pembangunan daerah tidak dapat dilepaskan dari sistem ekonomi-politik negara yang bersangkutan. Pendekatan regional dalam perencanaan selalu dimulai dengan pertanyaan yang menyangkut wilayah mana yang perlu dikembangkan untuk mencapai suatu tujuan pembangunan nasional. Sedangkan pendekatan sektoral lebih menitik beratkan pada sektor yang perlu mendapat prioritas untuk dikembangkan.

Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 14 kabupaten dan 5 kota, merupakan salah satu provinsi terbesar di Pulau Sumatera dengan luas mencapai $\pm 71.680 \text{ km}^2$ atau sekitar 3,72 persen dari luas Indonesia. Jumlah penduduk pada tahun 2002 sebanyak 11.800.000 jiwa.

Dalam upaya untuk memperlancar pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan daerah maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merancang suatu strategi dengan maksud untuk meningkatkan hasil pemerataan pembangunan, maka usaha yang dilakukan dengan membagi wilayah menjadi beberapa Wilayah Pembangunan.

Kriteria penentuan perwilayahan yang dilakukan pemerintah daerah pada dasarnya ditentukan ciri fisik dengan memperhatikan faktor geografis dan potensi alam. Untuk memudahkan perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, maka batas perwilayahan adalah berdasarkan batas administrasi pemerintah.

Pemerintah Daerah Sumatera Utara membagi Sumatera Utara menjadi 4 (empat) Wilayah Pembangunan (WP) adalah WP berpusat di Kota Sibolga meliputi Kota Sibolga, Kabupaten Nias, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal. Wilayah ini dicirikan sebagai wilayah pengembangan Pantai Barat dengan potensi utama adalah perkebunan rakyat, pertanian pangan, perikanan, pariwisata, peternakan. Wilayah ini merupakan wilayah maritim yang memerlukan pengembangan yang berhubungan dengan masalah maritim.

Wilayah Pembangunan II berpusat di Kota Pematang Siantar, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Karo, Dairi, Simalungun, Tapanuli Utara, dan Toba Samosir. Potensi utama yang terdapat di wilayah ini adalah holtikultura, pariwisata, perkebunan rakyat, pertanian pangan, perkebunan besar dan industri kerajinan rakyat. Wilayah ini merupakan dataran tinggi dan wilayah hulu sungai bagi hampir semua sungai yang ada di Sumatera Utara, sehingga masalah lingkungan hidup terutama kelestarian hutan dan sumber air bersih merupakan masalah utama di wilayah ini.

Wilayah Pembangunan III berpusat di Kota Medan, meliputi Kota Medan, Binjai, Tebing Tinggi, Kabupaten Langkat, Deli Serdang. Wilayah ini dapat dicirikan sebagai wilayah pembangunan Pantai Timur. Potensi utama yang terdapat di wilayah ini adalah perkebunan, pertanian pangan, perikanan, perdagangan, perindustrian dan pertambangan. Wilayah ini merupakan pusat kegiatan perdagangan industri di Sumatera Utara.

Wilayah Pembangunan IV berpusat di Kisaran yang meliputi Kabupaten Asahan, Labuhan Batu, dan Kota Tanjung Balai. Potensi utama yang terdapat di wilayah ini adalah perkebunan besa, pertanian pangan, perikanan dan industri. Wilayah ini merupakan dataran rendah sehingga masalah banjir adalah masalah utama dan merupakan daerah yang padat penduduknya.

Salah satu faktor penting yang akan menentukan keberhasilan proses pembangunan Indonesia adalah faktor perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita regional. Dalam Trilogi Pembangunan yang dijadikan pedoman dan arah pembangunan nasional selain pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, pemerataan menjadi salah satu bagian yang penting. Tanpa adanya pemerataan ekonomi, pertumbuhan nasional yang tinggi sekalipun bisa mempengaruhi stabilitas nasional (Majidi, 1997).

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi, salah satu indikatornya adalah Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita untuk tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita untuk tingkat daerah. Melalui perhitungan PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemakmuran suatu daerah. Dimana tinggi rendahnya tingkat kemakmuran di suatu daerah biasanya diukur dengan besar kecilnya angka pendapatan per kapita.

Dari pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai, dapat dilihat pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi yang telah memberikan sumbangan pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Bahkan dapat dilihat sektor ekonomi yang paling besar

memberikan sumbangan dalam pertumbuhan ekonomi tersebut, yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan ekonomi selanjutnya.

Sumatera Utara sebagai provinsi yang memiliki potensi pengembangan baik dari sisi infrastruktur, potensi pasar, tenaga kerja, dan sumber daya alam, telah mengalami pertumbuhan pada berbagai sektor ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi sebelum krisis ekonomi atau kurun waktu 1993 - 1997 mencapai 8,84 persen dan saat ini rata-rata 4 persen.

Bila dilihat perkembangan perekonomian antar wilayah secara persentase laju pertumbuhan meningkat cukup pesat di Wilayah Pembangunan III dan IV yang merupakan daerah kawasan Pantai Timur bagian utara dan selatan. Sedangkan di Wilayah Pembangunan I dan II terletak di kawasan Pantai Barat dan daerah pegunungan lambat perkembangannya.

Selain itu keadaan penduduk per daerah berbeda, kondisi geografi dan topografi antar daerah juga berbeda. Misalnya daerah yang berada di Wilayah Pembangunan III lebih maju, luas dataran lebih banyak daripada perbukitan dan pegunungan, cocok untuk industri dan pertanian, serta penduduknya lebih padat. Sebaliknya daerah-daerah yang berada di Wilayah Pembangunan I dengan topografi yang kurang menguntungkan, luas datarannya sangat sedikit dibandingkan dengan perbukitan dan pegunungan, cocok untuk pertanian, serta penduduknya jarang.

Suatu wilayah akan meningkat pesat seiring pembangunan sektoral yang dilihat dari peningkatan pemanfaatan ruang dan lahan sesuai kebutuhan sektor wilayah tersebut. Kendalanya saat ini adalah kuatnya pendekatan sektoral dan kurangnya keterpaduan antar sektor yang berakibat terjadinya tumpang tindih antar kegiatan sektor tertentu dalam satu wilayah. Untuk itu diperlukan strategi khusus perencanaan regional guna mengakomodasi kepentingan masing-masing wilayah.

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi dan juga adanya investasi, diharapkan dapat menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat. Dengan adanya peningkatan

kesempatan kerja akan meningkatkan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya tercapai kesejahteraan masyarakat yang merupakan salah satu tujuan pembangunan daerah.

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan proses kenaikan pendapatan perkapita daerah dalam jangka panjang. Faktor utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi adalah permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Sehingga sumber daya lokal akan dapat menghasilkan kekayaan daerah sekaligus dapat menciptakan peluang kerja daerah. Artinya sumber daya lokal baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia merupakan kunci dalam perekonomian suatu daerah yang merupakan potensi ekonomis untuk dapat dikembangkan secara optimal agar dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengaturan mengenai dampak pembangunan suatu daerah, seperti perubahan sektor-sektor apa yang meningkat atau menurun, merupakan pengetahuan yang penting dalam pembangunan suatu daerah. Suatu perekonomian bisa dikatakan mengalami pertumbuhan atau perkembangan jika tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai lebih tinggi dari waktu sebelumnya. Dengan kata lain, perkembangannya baru terjadi jika jumlah barang dan jasa secara fisik yang dihasilkan perekonomian tersebut bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya (Arsyad, 1992).

Perbedaan akselerasi pertumbuhan antar daerah diantaranya disebabkan oleh perbedaan sumber daya alam, sumber daya manusia, terbatasnya dana, sulitnya menarik investasi dan kemudian kompetitif dalam menembus pasar serta aksesibilitas antar wilayah. Konsentrasi pembangunan dengan mengejar pertumbuhan selama 30 tahun dengan harapan terjadi "*trickle down effect*" sebagai strategi mencapai pemerataan ternyata jauh dari harapan, bahkan menimbulkan masalah baru berupa kesenjangan baik antara individu, golongan, sektor maupun wilayah.

Menurut Todaro (2000) masalah mendasar lain yang saat ini ditemui di daerah meliputi kesenjangan distribusi pendapatan, kemiskinan, pengangguran, rendahnya

kesempatan kerja dan berusaha, tingkat pengetahuan, derajat kesehatan serta masalah struktural lainnya yang dikenal dengan lingkaran kemiskinan. Syafrizal (1997) menyatakan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, kebijakan utama yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh potensi (daerah) yang bersangkutan, dengan mengingat potensi yang dimiliki daerah bersangkutan, maka potensi masing-masing daerah harus menentukan kegiatan sektor dominan (unggulan). Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melihat spesialisasi dan daya saing untuk meningkatkan keunggulan perbandingan (*comparative advantage*) suatu sektor ekonomi di suatu daerah adalah melalui rasio kontribusi dan rasio pertumbuhan masing-masing sektor di suatu daerah terhadap jumlah output total di wilayah studi dan wilayah pembandingnya.

Pengembangan wilayah dengan pendekatan pertumbuhan sektor memungkinkan terjadinya keterkaitan (*linkage*) antar sektor atau antar daerah dalam suatu wilayah. Untuk mengimplementasikan kebijaksanaan tersebut setiap wilayah harus dapat mengidentifikasi sektor basis yang dapat menjamin pertumbuhan, peningkatan jumlah dan nilai tambah sektor dengan memperhatikan wilayah-wilayah pengembangan melalui strategi dan kebijaksanaan yang tepat.

Data statistik Sumatera Utara memperlihatkan khusus untuk perkembangan PDRB selama periode 1983-1996 perekonomian Sumatera Utara masih bersifat agraris dengan dominasi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB sekitar 32,68 persen sedangkan sektor industri sebesar 13,42 persen. Akan tetapi kecenderungan ini sudah tidak berlaku lagi pada tahun 1996 bahkan keadaan menjadi terbalik. Sektor yang menjadi motor penggerak perekonomian saat ini justru dari sektor industri yang memberikan kontribusinya sebesar 27,19 persen dan sektor pertanian menjadi sektor kedua terbesar dengan peran sebesar 24,96 persen.

Bila dilihat diantara ekspor komoditi non migas, ekspor hasil sektor industri ternyata menduduki peringkat paling tinggi, kemudian hasil pertanian. Ekspor pada tahun 1996 dari hasil industri, terbesar berasal dari komoditi karet olahan yaitu sebesar

24 persen, kemudian diikuti dari komoditi minyak sawit sebesar 18 persen, kayu lapis sebesar 11 persen dan barang alumunium sebesar 8 persen. Sedangkan kontribusi terbesar dari hasil pertanian yang berasal dari komoditi udang sebesar 5 persen dan tembakau sebesar 3 persen. Hasil ekspor lainnya yang dikumulatitkan dari ekspor hasil industri dan ekspor hasil pertanian seluruhnya sebesar 31 persen.

Disamping itu sampai dengan tahun 1988, jumlah rencana Penanaman Modal Asing (PMA) yang disetujui mengalami peningkatan, kemudian turun pada tahun 1989. Namun terjadi lonjakan hebat pada tahun 1990. Dari US \$ 642 juta yang direncanakan, sebesar 82,71 persen dapat terealisasi atau senilai US \$ 531 juta. Tahun 1991 terjadi penurunan drastis, namun terjadi lonjakan pada tahun 1992 dan menurun drastic pada tahun 1993. Namun dari US \$ 17 juta nilai PMA yang direncanakan seluruhnya dapat terealisasi. Untuk selanjutnya sampai dengan tahun 1996 terjadi peningkatan, namun peningkatan nilai rencana PMA tersebut tidak disertai dengan peningkatan nilai realisasi. Rencana Penanaman Modal Asing yang disetujui pemerintah pada tahun 1996 meliputi lima sektor. Sektor pertambangan mendapat bagian terbesar dari seluruh PMA yang disetujui pemerintah, yaitu sebesar 63 persen, diikuti sektor perhotelan dan jasa-jasa masing-masing sebesar 14 persen dan 13 persen kemudian sektor industri sebesar 8 persen dan yang mendapat bagian terkecil adalah sektor pertanian sebesar 2 persen.

Pembangunan daerah dan pembangunan sektoral perlu selalu dilaksanakan selaras sehingga pembangunan sektoral yang berlangsung di daerah-daerah benar-benar sesuai dengan potensi dan prioritas daerah. Koordinasi fungsional perwilayahan dan kerja sama pembangunan antar daerah perlu lebih ditingkatkan untuk lebih melancarkan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan-kegiatan pembangunan. Dengan demikian ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat dikurangi dan kesejahteraan masyarakat secara umum dapat terus ditingkatkan. Oleh karena penting kiranya dilakukan studi tentang pembangunan regional yang berjudul "Studi Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara"

1.2 Tujuan Studi

Tujuan yang ingin dicapai dari studi ini adalah untuk menggambarkan hasil-hasil pembangunan sosial dan ekonomi di Sumatera Utara serta basis ekonomi yang menjadi pendorong pertumbuhan.

1.3 Manfaat Studi

Dengan diketahuinya hasil pembangunan dan pertumbuhan yang terjadi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, maka hasil studi ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi :

1. Pemerintah daerah, khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan pembangunan.
2. Pihak lain yang memerlukan perencanaan ekonomi dalam rangka memobilisasi sumber daya ekonomi dan pembangunan agar mencapai sasaran dengan kondisi dan potensi daerah.

1.4 Ruang Lingkup Studi

Studi ini dilaksanakan di Sumatera Utara dengan mengambil kajian Wilayah Pembangunan yang ada. Wilayah Pembangunan I meliputi pantai barat dengan pusat Padangsidempuan, Wilayah Pembangunan II meliputi wilayah pegunungan dengan pusat Siantar, Wilayah Pembangunan III meliputi pantai timur bagian utara dengan pusat Medan dan Wilayah Pembangunan IV meliputi pantai timur bagian selatan.

1.5 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam studi ini merupakan data sekunder yang dihasilkan dari berbagai instansi dan hasil publikasi resmi. Data yang dibutuhkan antara lain data kondisi umum daerah Sumatera Utara, kependudukan dan ketenagakerjaan, perekonomian, pengeluaran pembangunan, penanaman modal dan ekspor. Sumber data studi ini antara lain Bappeda Sumatera Utara, Dinas Tenaga Kerja, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Daerah Sumatera Utara, Kantor Statistik, dan lainnya.

1.6 Metode Analisis

Mengambarkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara digunakan digunakan statistik deskriptif. Untuk menetapkan suatu sektor dikatakan sektor basis dalam suatu perekonomian paling dominan dan menjadi basis pada Wilayah-Wilayah Pembangunan di Sumatera Utara digunakan koefisien keuntungan tempat atau *Location Quotient* (LQ). Koefisien LQ banyak digunakan sebagai alat yang sederhana untuk mengukur spesialisasi relatif suatu wilayah pada sektor-sektor tertentu. Koefisien LQ mempunyai penggunaan yang luas, sehingga berbagai satuan pengukuran dapat digunakan dalam perhitungannya. Yang paling umum digunakan adalah untuk menghitung basis ekonomi dari sisi output (PDRB) dan penggunaan tenaga kerja. Koefisien LQ dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$LQ_{ij} = \frac{Y_{ij}/Y_j}{Y_i/Y}$$

Dimana :

LQ_{ij} = koefisien Location Quotient sektor i Wilayah Pembangunan j

Y_{ij} = PDRB sektor i Wilayah Pembangunan n, j (rupiah)

Y_j = PDRB Wilayah Pembangunan j (rupiah)

Y_i = PDRB sektor i Sumatera Utara (rupiah)

Y = PDRB Sumatera Utara (rupiah)

Kriteria penilaian dari hasil perhitungan koefisien LQ adalah : jika suatu sektor memiliki koefisien $LQ > 1$, maka sektor tersebut menguntungkan atau unggul dalam pendapatan. Namun bila suatu sektor memiliki koefisien $LQ < 1$, berarti sektor tersebut tidak menguntungkan atau tidak unggul dalam hal pendapatan atau pembentukan produk domestik.

BAB II

KONSEP-KONSEP PEMBANGUNAN

2.1 Konsep Pembangunan Ekonomi

Menurut Rostow (1961) pengertian pembangunan tidak hanya pada lebih banyak output yang dihasilkan, tetapi juga lebih banyak jenis output daripada yang diproduksi sebelumnya. Dalam perkembangannya, pembangunan melalui tahapan-tahapan : masyarakat tradisional, pra kondisi lepas landas, lepas landas, gerakan menuju kematangan dan masa konsumsi besar-besaran. Kunci di antara tahapan ini adalah tahap tinggal landas yang didorong oleh satu sektor atau lebih (dalam Todaro, 1998).

Pengertian pembangunan ekonomi (*economic development*) dan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) adalah sebagai kenaikan dalam GDP (*Gross Domestik Product*) dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk sesuatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Sukirno, 1985).

Tujuan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam kebijaksanaan dan sasaran, strategis tidak dapat dirumuskan dengan menggunakan variabel sektoral tetapi dengan variabel kewilayahan. Perubahan pembangunan wilayah pada dasarnya mempunyai arti peningkatan nilai manfaat (*value added*) wilayah bagi masyarakat suatu wilayah tertentu maupun menampung lebih banyak peningkatan dengan tingkat kesejahteraan yang baik yakni dengan tersedianya sarana prasarana (Hall, 1989).

2.2 Pembangunan Di Negara Sedang Membangun

Negara-negara sedang membangun mempunyai sifat yang berbeda dengan negara-negara yang relatif lebih maju. Sifat-sifat tersebut merupakan aspek-aspek khusus dari kemiskinan, terutama sifat sosial dan ekonomi negara yang sedang membangun (Irawan dan Suparmoko, 1992).

Menurut Todaro (1998) negara membangun mempunyai kesamaan yang dapat dikategorikan dalam keadaan sebagai berikut : baku hidup yang rendah sebagai akibat pendapatan yang rendah, disparitas pendapatan yang parah, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang kurang memadai, produktivitas rendah, pertumbuhan penduduk yang tinggi dan beban ketergantungan tinggi, pengangguran terus bertambah, masih tergantung kepada sektor primer, pasar tidak sempurna dan keterbatasan informasi dan ketergantungan yang rapuh dalam semua aspek hubungan internasional.

Demikian pula dengan Baldwin dan Meier yang mengemukakan 6 sifat ekonomis yang terdapat di negara miskin atau sedang membangun yaitu negara tersebut merupakan produsen barang primer, menghadapi masalah tekanan penduduk, sumberdaya alam belum banyak diolah, penduduk masih terkebelakang dari segi ekonomi, kekurangan kapital dan orientasi perdagangan ke luar negeri (dalam Irawan dan Suparmoko, 1993)

Negara-negara di Afrika Barat mengalami kesulitan-kesulitan alam untuk melakukan pembangunan ekonominya. Pada tahap permulaan pembangunan ekonominya, Ghana dan Nigeria melakukan kombinasi antara kelebihan penduduk dengan lahan pertanian. Namun sering munculnya kekacauan dan perang saudara menyebabkan negara ini mengalami kesulitan dalam mengeksploitasi sumberdaya alam.

Di tahun 70-an Nigeria mengalami perubahan orientasi pembangunan negaranya akibat adanya ledakan minyak. Dan dimulailah industrialisasi dengan membangun proyek-proyek industri. Sementara itu Ghana masih terus mempertahankan komoditi pertanian sebagai andalan perekonomiannya.

Lewis (dalam Mountjoy, 1983) menegaskan bahwa cara paling meyakinkan untuk mempromosikan industrialisasi di Ghana adalah meletakkan fondasi yang diperlukan dengan mengambil langkah-langkah giat untuk meningkatkan produksi pangan per pekerja yang terlibat dalam kegiatan pertanian. Cara ini paling tepat

untuk menghasilkan permintaan yang besar dan terus meningkat atas barang manufaktur. Tetapi peningkatan produksi pangan lambat maka industrialisasi akan tersendat-sendat.

Chili merupakan contoh tipikal negara membangun di Amerika Latin, karena kebanyakan di kawasan ini negara-negara menghadapi masalah yang hampir sama dengan Chili dalam memperkenalkan industri barat di negaranya masing-masing. Seperti kebanyakan negara di Amerika Latin, Chili juga telah mampu memenuhi kebutuhan dalam pembuatan barang-barang konsumen. Kemampuan ini dicapai karena seringnya terjadi kekurangan di masa revolusi dan krisis devisa.

Populasi penduduk Chili mengalami kenaikan rata-rata 2 persen per tahun, sedangkan produksi pangan per kapita hanya meningkat sebesar 0,6 persen per tahun. Hal ini merupakan akar dari keterbelakangan sektor pertanian. Pembuatan land-reform dengan maksud menanggalkan sistem sewa tanah anakronistik, mengurangi luas lahan yang tidak produktif dan membagi tanah secara lebih merata (Mountjoy, 1983).

India merencanakan pembangunannya sebagai suatu negara kemakmuran (*welfare state*) dengan metode-metode yang lunak, yang didasarkan atas kerja sama dari penduduk yang bebas. Usaha-usaha dan kemajuan-kemajuan yang diraih India mendapat perhatian simpatik dari dunia Barat.

Dalam pembangunan sektor industri, di India memiliki kecenderungan biaya produksinya lebih tinggi dari standar dunia. Industri besar di sektor swasta masih banyak dibantu oleh manajemen Eropa, tetapi industri di sektor pemerintah sebagian besar mengandalkan manajemen pejabat-pejabat pemerintah senior dan pejabat perusahaan kereta api yang ternyata sangat tidak efektif.

Dalam menghadapi pembangunan yang berencana di India, ada beberapa segi yang perlu ditekankan. Segi yang pertama dan paling fundamental yaitu perlunya membangun sektor pertanian untuk melengkapi dan mendorong sektor industri.

Yang kedua, keberhasilan yang diperoleh India dalam pembangunan yang berencana terancam oleh populasi yang jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan. Akibatnya hal ini menjadi salah satu faktor yang menunda India mencapai proses lepas landas (*take off*). Hal ketiga yaitu menyangkut ukuran industri yang besar dalam sebuah negara yang besar yang mengharuskan adanya bantuan luar negeri dalam jumlah besar dengan bunga yang rendah.

Kesukaran-kesukaran pada masa pematangan industri menyebabkan kurang berhasilnya proyek-proyek industri. Perluasan landasan struktur industri berjalan lambat namun efisiensi produksi terus meningkat dan memudahkan pertumbuhan ekspor. Proses transformasi di India berjalan terlalu lambat dan sukar dipercepat (Mountjoy, 1983).

2.3 Kebijakan Pembangunan Di Indoensia

Strategi dasar pembangunan dalam periode PJP I (1969-1994), yang dimulai dengan Repelita I, diarahkan pada pencapaian stabilitas nasional dan pertumbuhan ekonomi, serta menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri yang menunjang sektor pertanian. Ditematkannya stabilitas dan pertumbuhan ekonomi sebagai strategi dasar, didasarkan pada pertimbangan bahwa untuk melaksanakan Repelita yang sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan (diperioritaskan) untuk menciptakan landasan yang penting bagi berhasilnya pelaksanaan Repelita (Djamin, 1995).

Demikian pula dengan pertimbangan untuk menitik beratkan sektor pertanian dan industri yang menunjang sektor pertanian, didasarkan pada pertimbangan bahwa Indonesia adalah negara agraris. Namun bila kita perhatikan tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spritual, maka diperlukan waktu yang panjang, yang akan dilaksanakan melalui serangkaian Repelita, yang garis-garis besarnya ditetapkan sendiri oleh rakyat melalui MPR yang berbentuk GBHN.

Dalam GBHN antara lain ditetapkan bahwa pelaksanaan pembangunan disamping meningkatkan pendapatan nasional rakyat sesuai dengan rasa keadilan. Dalam rangka diwujudkannya asas keadilan sosial sehingga disatu pihak pembangunan itu tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan produksi, melainkan sekaligus mencegah melebarinya jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Dilain pihak lapisan masyarakat yang terlibat dalam pembangunan harus memikul beban pembangunan, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan ataupun dalam menerima kembali hasil pembangunan (Djamin, 1995).

Kebijakan-kebijakan pemerataan yang digariskan dalam rangka menanggulangi masalah disparitas termaktub dalam delapan jalur pemerataan yang tindakan konkritnya berupa penyeimbangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta pengutamaan prioritas investasi untuk daerah-daerah di luar Jawa termasuk di wilayah Indonesia Bagian Barat. Penyediaan fasilitas dan rangsangan pertumbuhan bagi golongan ekonomi lemah dan usaha kecil termasuk koperasi menjadi perhatian bagi pemerintah untuk dibina dan dikembangkan. Namun hal tersebut sesungguhnya lebih merupakan layanan politis (Dumairy, 1995).

Perubahan skala prioritas Trilogi Pembangunan dari pertumbuhan ke pemerataan tidak diikuti dengan perubahan strategi yang mendasar, dimana strategi pembangunan tetap saja bertumpu pada pertumbuhan, karena strategi pemerataan yang dilaksanakan hanyalah bersifat penyisipan kebijakan pemenuhan kebutuhan pokok di sela-sela strategi yang tetap bertumpu pada pertumbuhan. Di samping kebijaksanaan pemerataan yang tambal sulam tersebut, reaksi pemerintah dalam menanggapi tuntutan pemerataan itu juga terlambat dimana disparitas itu sudah ada sejak akhir Pelita I namun pemerintah baru mulai menanggapi pada Pelita III (Dumairy, 1995).

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah pada hakekatnya ditentukan oleh potensi sumber daya alam yang ada, prasarana dan sarana yang dibangun, modal yang tersedia serta kemampuan sumber daya manusia di masing-masing daerah.

Keempat sumber daya tersebut harus cukup tersedia untuk menunjang pembangunan daerah (Sumodiningrat, 1996).

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi yang diinginkan diperlukan mekanisme pembangunan yang lebih sistematis. Yang dimaksud dengan mekanisme pembangunan adalah gerak ke depan dari suatu sistem yang berdimensi pada produksi, pendapatan, tingkat hidup, sikap, kelembagaan serta kebijaksanaan. Mekanisme pembangunan ini ditopang oleh sumber-sumber berupa modal fisik, modal manusia, dan modal kelembagaan. Dalam usaha untuk meningkatkan pembangunan, ketiganya harus ditingkatkan kuantitasnya, diperbaiki kualitasnya dan dimanfaatkan secara lebih efisien. Jumlah penyediaan modal fisik ini dapat diukur dengan uang. Modal fisik dalam hal ini diasumsikan mewakili modal keseluruhan, sedangkan pendapatan nasional analog dengan produksi nasional, sehingga walau kurang tepat benar, suatu kenaikan pendapatan nasional dapat dipergunakan sebagai ukuran kemajuan ekonomi (Kunarjo, 1996).

Walaupun pengeluaran pemerintah secara keseluruhan sangat penting dalam sumbangannya terhadap pendapatan nasional, tetapi yang lebih penting lagi adalah penentuan komposisi dari pengeluaran pemerintah. Komposisi dari pengeluaran pemerintah merupakan strategi untuk mencapai sasaran dari pembangunan nasional. Dengan komposisi pengeluaran akan terjawab pertanyaan pengeluaran mana kiranya yang lebih diprioritaskan. Misalnya apakah pengeluaran rutin harus lebih besar dari biaya pembangunan ataukah sektor pertahanan diperbesar lebih dari anggaran untuk sektor-sektor lainnya (Kunarjo, 1996).

Anggaran belanja yang seimbang pada umumnya dititik-beratkan pada perbaikan dan rehabilitasi prasarana. Di samping itu, anggaran belanja juga memegang peranan yang sangat penting dalam mendorong kredit investasi jangka menengah melalui sistem perbankan. Dalam menyalurkan dana-dana kredit ke bidang-bidang produksi yang diprioritaskan, pemerintah mempergunakan suku bunga

pinjaman yang berlainan tergantung sektor apa yang menjadi prioritas pembangunan, akan mendapat bunga pinjaman yang diprioritaskan (Salim, 1976).

2.4 Pembangunan Ekonomi dan Pengembangan Potensi Daerah

Dalam mengkaji masalah perencanaan dan pembangunan daerah, maka yang menjadi perhatian adalah mengenai konsep dasar wilayah (*region*). Pengertian wilayah tergantung pada aspek tinjauannya. Menurut Arsyad (1999) dari aspek ekonomi wilayah ada tiga pengertian wilayah yaitu, wilayah homogen, wilayah nodal dan wilayah perencanaan (wilayah administrasi).

Suatu wilayah dianggap sebagai ruang di mana kegiatan ekonomi terjadi dan didalam berbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Kesamaan sifat-sifat tersebut antara lain dari segi pendapatan perkapitanya, sosial budayanya, geografisnya dan sebagainya. Wilayah dalam pengertian seperti ini disebut *wilayah homogen*. Suatu wilayah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi wilayah dalam pengertian ini disebut dengan *wilayah nodal*. Suatu wilayah adalah suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu administrasi tertentu seperti satu provinsi, kabupaten, kecamatan dan sebagainya. Jadi daerah disini didasarkan pada pembagian administrasi suatu negara. Wilayah dalam pengertian ini dinamakan *wilayah perencanaan atau wilayah administrasi* (Tarigan, 1999)

Daerah yang paling tepat untuk keperluan pembangunan daerah adalah daerah nodal tetapi justru kurang dikembangkan di berbagai negara. Sebaliknya daerah administrasi kurang tepat tetapi sudah banyak dibangun. (Sugiono, 1999) Pada lokasi yang terpadu di suatu daerah menimbulkan suatu daerah nodal yang memiliki integrasi fungsional yang saling bergantung, hal ini tercermin pada berbagai hubungan aktivitas yakni hubungan vertikal maupun hubungan horizontal.

Pada perencanaan tingkat provinsi aspek tata ruang perlu diperhatikan, dalam hal ini pengaturan lokasi kegiatan ekonomi dan sosial akan sangat penting artinya

dalam rangka meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya yang ada sekaligus mengurangi perbedaan kemakmuran antar tempat. Sedangkan pada perencanaan pada tingkat kabupaten perhatian akan lebih banyak diarahkan pada penentuan lokasi program dan proyek secara terperinci, sehingga pengaturan tata ruang akan lebih sempurna (Syafrizal, 1985).

Pembangunan wilayah menurut Sandy (1982) pada hakekatnya adalah pelaksanaan pembangunan nasional di suatu wilayah yang disesuaikan dengan kemampuan fisik dan sosial wilayah tersebut serta tetap mentaati peraturan perundangan yang berlaku. Hadjisaroso (1994) mengemukakan bahwa pengembangan wilayah merupakan suatu tindakan mengembangkan wilayah atau dengan membangun daerah atau kawasan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan hidup masyarakat.

Tujuan utama pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah beserta masyarakatnya dengan menggunakan sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Pengertian pengembangan dan pembangunan wilayah sering digunakan untuk maksud yang sama, walaupun sebenarnya dapat dibedakan pengertiannya. Pengembangan ialah memajukan atau memperbaiki sesuatu yang sudah ada, sedangkan pembangunan adalah mengadakan atau membuat sesuatu yang belum ada.

Menurut Soegijoko (1997) pengembangan wilayah merupakan upaya pemerataan pembangunan dengan mengembangkan wilayah-wilayah tertentu melalui berbagai kegiatan sektoral secara terpadu, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan

ekonomi daerah itu secara efektif dan efisien serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Pemerintah melakukan berbagai program pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dimana pembangunan tersebut berlandaskan pada pengertian sebagai pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia (Soehardi, 1985).

Seperti pendapat di atas, Dugary (1982) juga menyatakan bahwa pada dasarnya pembangunan wilayah berkenaan dengan tingkat dan perubahan selama kurun waktu tertentu suatu rangkaian variabel seperti produksi, penduduk, angkatan kerja, rasio modal-tenaga dan imbalan bagi faktor (*faktor returns*).

Ananta (1993) menjelaskan pertumbuhan ekonomi biasanya disertai dengan adanya proses akselerasi. PEMBERDAYAAN sumber daya dan dana untuk menunjukkan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Dalam rangka melihat fluktuasi pertumbuhan ekonomi tersebut dengan secara riil dari jangka waktu tahun ke tahun akan tergambar melalui besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau indeks harga konsumen secara berkala. Yaitu pertumbuhan yang positif akan menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya apabila negatif akan menunjukkan adanya penurunan.

Sedangkan menurut Kaldor (1957) pertumbuhan ekonomi yang terbaik, yakni pertumbuhan dengan tingkat optimum. Dalam hal ini harus diperhatikan komposisi kekuatan atau output yang dihasilkan. Dengan tanpa memandang pengorbanan generasi sekarang yang mungkin diperlukan untuk membuat pertumbuhan keluaran output totalnya lebih cepat (Jhingan, 1993).

Hicks (1967) menarik kesimpulan dari perbedaan yang umum terdapat dalam konteks perkembangan dan pertumbuhan. Pendapat tersebut diperjelas dengan mengatakan bahwa perkembangan ekonomi mengacu pada masalah negara-negara

dengan kondisi ekonomi yang terbelakang, sedangkan pertumbuhan lebih mengacu pada masalah di negara-negara maju.

Bonne (1979) berpendapat bahwa perkembangan memerlukan dan melibatkan semacam pengarah dan pedoman dalam rangka menciptakan kekuatan-kekuatan bagi perluasan dan pemeliharaan. Begitulah yang sebenarnya terjadi pada kebanyakan negara terbelakang, sedangkan ciri pertumbuhan spontan merupakan ciri perekonomian maju dengan kebebasan usaha.

Schumpeter mengemukakan perbedaan yang lebih tegas tentang perkembangan yang merupakan perubahan secara spontan dan terputus-terputus dalam keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi keseimbangan yang ada sebelumnya. Sedangkan pertumbuhan adalah perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan penduduk (Sukirno, 1985).

Pembedaan yang paling sederhana dibuat oleh Madisson (1970) yaitu : di negara-negara maju kenaikan dalam tingkatan pendapatan biasanya disebut pertumbuhan ekonomi, sedangkan di negara miskin disebut perkembangan ekonomi.

Pertumbuhan dapat diukur dan bersifat objektif, merupakan gambaran perluasan tenaga-tenaga kerja, modal, volume perdagangan dan konsumsi. Perkembangan ekonomi dapat dipergunakan untuk menggambarkan faktor-faktor penentu yang mendasari pertumbuhan ekonomi, seperti perubahan dalam teknik produksi, sikap masyarakat dan lembaga-lembaga. Perubahan tersebut dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi.

Namun terlepas dari perbedaan yang tampak ini, beberapa ahli ekonomi menggunakan istilah tersebut sebagai sinonim. Baran (1980) berpendapat bahwa gagasan perkembangan dan pertumbuhan itu sendiri mengesankan suatu peralihan kepada sesuatu yang baru dari sesuatu yang lama.

Sasmita (1983, dalam Hadjisaroso, 1994) menyimpulkan pola pertumbuhan ekonomi wilayah tidak sama dengan apa yang ditemukan pada pertumbuhan ekonomi nasional. Pada dasarnya disebabkan pada analisa pertumbuhan ekonomi wilayah yang lebih menekankan pengaruh perbedaan karakteristik space terhadap pertumbuhan ekonomi. Kesamaannya yakni penekanannya pada unsur waktu yang merupakan faktor penting dalam analisa pertumbuhan ekonomi wilayah.

Perbedaan lainnya dengan teori pertumbuhan nasional adalah teori pertumbuhan nasional faktor yang sangat diperhatikan adalah modal, lapangan pekerjaan, dan kemajuan teknologi yang bisa timbul dalam berbagai bentuk, sedangkan pada teori pertumbuhan ekonomi wilayah faktor yang mendapat perhatian utama adalah keuntungan lokasi, aglomerisasi, migrasi, dan arus lalu lintas modal antar wilayah.

Esmara (1986) mengelompokkan teori pertumbuhan ekonomi wilayah atas 4, yaitu:

1. Kelompok pertama disebut sebagai *export base-models*.

Dipelopori oleh North (1955) dan dikembangkan oleh Tiebout (1956), kelompok ini mendasarkan pandangan dari sudut teori lokasi, berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi suatu region lebih banyak ditentukan oleh jenis keuntungan lokasi dan dapat dipergunakan oleh wilayah tersebut sebagai keuntungan ekspor. Pertumbuhan suatu wilayah akan ditentukan oleh eksplorasi dan eksploitasi yang bersifat alamiah. Pertumbuhan ekspor wilayah yang bersangkutan juga dipengaruhi oleh tingkat permintaan ekstern wilayah lain.

Pendapatan yang diperoleh dari penjualan ekspor akan mengakibatkan berkebangnya kegiatan-kegiatan penduduk setempat, perpindahan modal dan tenaga kerja, keuntungan eksternal dan pertumbuhan wilayah lebih lanjut. Dengan kata lain, bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan suatu region, strategi pembangunannya harus disesuaikan dengan keuntungan lokasi yang

dimilikinya dan tidak harus sama dengan strategi pembangunan pada tingkat nasional.

2. Kelompok kedua lebih berorientasikan pada kerangka pemikiran Neo-Klasik

Dipelopori oleh Stein (1964) dan dikembangkan oleh Roman (1965) dan Siebert (1969). Kelompok ini mendasarkan analisisnya pada peralatan fungsi produksi. Dikatakan bahwa unsur-unsur yang menentukan pertumbuhan ekonomi wilayah adalah tanah, tenaga kerja, dan modal. Dalam kelompok ini juga dibahas tentang pengaruh perpindahan penduduk (*migrasi*) dan lalu lintas modal terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah.

Dalam model ini terdapat hubungan antar tingkat pertumbuhan suatu negara dengan perbedaan kemakmuran wilayah (*regional disparity*) pada negara yang bersangkutan. Pada saat proses pembangunan baru dimulai (*negara sedang berkembang*) tingkat perbedaan kemakmuran antar wilayah cenderung akan tinggi (*divergence*), bila proses pembangunan telah berjalan dalam waktu yang lama (*sedang berkembang*) perbedaan tingkat kemakmuran antar wilayah cenderung menurun (*convergence*).

3. Kelompok ketiga, menggunakan jalur pemikiran Keynes yang disebut *cumulative-causative models*.

Dipelopori oleh Myrdal (1975) dan dilanjutkan oleh Kaldor. Kelompok ini berpendapat peningkatan pemerataan pembangunan antar wilayah tidak hanya diserahkan pada kekuatan pasar (*market mechanism*). Perlu adanya campur tangan pemerintah dalam bentuk program-program pembangunan wilayah, terutama wilayah yang relatif masih terbelakang.

4. Kelompok keempat dinamakan *core-periphery models*.

Dipelopori oleh Friedman (1966). Kelompok ini menekankan pada hubungan yang kuat dan saling mempengaruhi antara pembangunan kota (*Core*) dan desa (*Peripheral*). Menurut teori tersebut, gerak langkah pembangunan wilayah perkotaan akan lebih banyak ditentukan oleh keadaan desa-desa yang ada

disekitarnya. Corak pembangunan wilayah pedesaan akan ditentukan oleh arah pembangunan perkotaan. Dengan demikian aspek interaksi antar daerah (*spatial interaction*) akan lebih ditonjolkan.

Konsep pusat pengembangan sebagai alat perumus kebijaksanaan tidak saja dilakukan pada tingkat wilayah tetapi juga pada tingkat nasional. Dalam hal ini seringkali terjadi pertentangan antara kepentingan wilayah dan nasional, terutama dalam penentuan lokasi dan anggota, dapat menimbulkan kepincangan pembangunan yang semakin tinggi (Esmara, 1986)

Dalam perkembangan ekonomi wilayah "Hoover dan Fisher" mengemukakan tahapan-tahapan dalam pembangunan ekonomi wilayah yakni :

1. Subsistensi ekonomi, dalam hal ini dikatakan bahwa pembangunan ekonomi wilayah akan sama halnya dengan pembangunan nasional, di mana pembangunan tersebut akan berjalan secara berkesinambungan dan subsisten.
2. Pengembangan transportasi dan spesialisasi lokal, dalam hal ini dimaksudkan bahwa dalam tahapan pembangunannya suatu pembangunan wilayah hendaknya memusatkan diri pada potensi-potensi yang dimilikinya dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif dan kompetitif, untuk mampu bersaing dengan wilayah lain.
3. Perdagangan antar wilayah, dalam hal ini dimungkinkan dengan besarnya output wilayah tersebut serta kemampuannya untuk bersaing dengan wilayah lain.
4. Industrialisasi, pada tahap ini pembangunan wilayah sudah memasuki tahap dunia industri. Dengan demikian maka sektor primer sudah mulai ditinggalkan dan terjadinya perubahan struktur.
5. Spesialisasi wilayah, dalam tahap ini pembangunan wilayah berusaha menetapkan spesialisasi dengan mempertimbangkan potensi utama yang terdapat di wilayahnya.

6. Aliran faktor produksi antar wilayah. Dalam tahap ini suatu wilayah tidak hanya mengandalkan faktor produksi yang ada di wilayahnya. Kekurangan akan faktor produksi dapat dialirkan dari wilayah lain dan demikian pula sebaliknya.

BAB III

HASIL PEMBANGUNAN SOSIAL SUMATERA UTARA

3.1 Kondisi Geografis

Provinsi Sumatera Utara merupakan satu dari sembilan provinsi yang berada di Sumatera. Sumatera Utara menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi di Kawasan Barat Indonesia terutama di bagian utara, dan secara geografis serta letak administrasi berada di urutan dua setelah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Sumatera Utara ditetapkan sebagai satu provinsi pada tanggal 15 April 1948 sebagai realisasi Undang-Undang No. 10 Tahun 1948. Secara geografis provinsi ini berada pada 1° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur. Di sebelah utara Provinsi Sumatera Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, di sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Riau, di timur dibatasi oleh Selat Malaka dan di barat dibatasi oleh Samudera Hindia. Letaknya strategis karena berada di antara jalur perdagangan internasional dan berdekatan dengan Negara Malaysia dan Singapura.

Luas Sumatera Utara $\pm 71.680 \text{ km}^2$ atau sekitar 3,72 persen dari luas Republik Indonesia. Secara geografis Sumatera Utara di bagi atas tiga bagian besar yaitu daerah pantai barat dengan luas $\pm 26.413 \text{ km}^2$ atau sekitar 38,85 persen dari luas provinsi. Daerah pantai timur dengan luas $\pm 24.948 \text{ km}^2$ dan daerah pegunungan memiliki luas mencapai $\pm 20.137 \text{ km}^2$ atau sekitar 28,35 persen dari luas Sumatera Utara. Jumlah pulau-pulau yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara sekitar 162 pulau, dengan perincian 6 pulau berada di wilayah pantai timur dan 156 pulau berada di wilayah pantai barat.

Iklm di Sumatera Utara termasuk ke dalam iklim tropis dengan curah hujan rata-rata per tahun sekitar 1.955 mm dengan kelembaban udara ra-rata 82,5 persen dan temperatur rata-rata $26,12^{\circ} \text{ C}$. Daratan Provinsi Sumatera Utara berada antara 0

hingga 2.819 m di atas permukaan laut. Di sebagian wilayah pantai barat memiliki lahan pertanian yang kurang subur karena beriklim agak kering.

Ditinjau dari sudut kemiringan, topografi digolongkan kepada daerah datar, berombak, bergelombang, curam dan terjal. Daerah datar dengan derajat kemiringan 0° - 8° luasnya mencapai 2.762,714 hektar yang cocok untuk dimanfaatkan untuk pemukiman, lahan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan. Daerah berombak dengan derajat kemiringan 15° - 25° luasnya sekitar 552,155 hektar dan kebanyakan dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan, penghijauan dan sebagian kecil untuk lahan pertanian.

Daerah curam dengan derajat kemiringan 25° - 45° luasnya mencapai 1.013,084 hektar yang keseluruhannya digunakan untuk penghijauan dan pengelolaan hutan produksi. Dan daerah terjal dengan derajat kemiringan lebih dari 45° luasnya mencapai 1.681,148 hektar dan hanya dimanfaatkan bagi pengelolaan reboisasi dan hutan lindung.

3.2 Kondisi Kependudukan

Berdasarkan hasil Sensus tahun 2000 jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara sebanyak 11.513.973 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata tahun 1990-2000 mencapai 1,20 persen. Pertumbuhan tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan pertumbuhan pada dekade sebelumnya. Pada periode 1961 - 1971 laju pertumbuhan rata-rata 2,95 persen dan menurun pada periode berikutnya menjadi 2,60 persen dan selama 1980 - 1990 menjadi 2,06 persen.

Sejak tahun 1961 hingga saat ini, jumlah penduduk di Kabupaten Deli Serdang merupakan yang terbesar. Tahun 1961 sebanyak 971.621 jiwa dan di tahun 2000 meningkat menjadi 1.959.488 jiwa. Sedangkan daerah yang memiliki jumlah penduduk terkecil adalah Kota Sibolga yang hanya 82.310 jiwa pada hasil sensus tahun 2000. Gambaran ini dapat dilihat melalui Tabel 1 berikut:

Tabel 1 : Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 1961- 2000 (jiwa)

Kabupaten/Kota	1961	1971	1980	1990	2000
Kabupaten					
01. Nias	314.829	370.825	468.375	589.184	683.416
02. Mandailing Natal	-	-	254.342	308.782	359.849
03. Tap. Selatan ¹⁾	495.060 ¹⁾	628.394 ¹⁾	502.817	645.550	734.364
04. Tap. Tengah	100.795	135.857	167.161	214.467	244.679
05. Tapanuli Utara ²⁾	560.384 ²⁾	622.535 ²⁾	390.938	406.244	407.711
06. Toba Samosir	-	-	291.499	289.533	304.125
07. Labuhan Batu	255.997	360.153	547.171	733.521	844.924
08. Asahan	409.006	593.584	775.656	884.594	935.855
09. Simalungun	496.238	662.257	759.024	805.365	855.802
10. Dairi	138.278	184.829	241.785	276.980	292.857
11. Karo	147.673	182.156	219.204	257.981	283.713
12. Deli Serdang	971.621	1.430.965	1.241.190	1.602.749	1.959.488
13. Langkat	341.615	519.459	702.059	812.229	906.565
Kota					
14. Sibolga	38.655	42.223	59.897	71.895	82.310
15. Tanjung Balai	29.152	33.604	41.894	108.202	132.438
16. Pem. Siantar	114.870	129.232	150.376	219.328	241.524
17. Tebing Tinggi	26.228	30.314	92.087	116.767	125.006
18. Medan	479.098	635.562	1.378.955	1.730.752	1.905.587
19. Binjai	45.235	59.882	76.464	181.904	213.760
SUMUT	4.964.734	6.621.831	8.360.894	9.256.027	11.513.973

Sumber : Sensus Penduduk 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, Kantor BPS Sumatera Utara

*) Termasuk Penduduk Bertempat Tinggal Tidak Tetap

1) Masih termasuk Kabupaten Mandailing Natal

2) Masih termasuk Kabupaten Toba Samosir

Melalui Tabel 2 dapat dilihat laju pertumbuhan penduduk Sumatera Utara menurut kabupaten dan kota. Pada periode 1980 – 1990, pertumbuhan penduduk Kota Tebing Tinggi dan Binjai sangat tinggi karena adanya peralihan wilayah dari kabupaten yang berdekatan denganya. Demikian pula dengan Medan periode 1971 –

1980 tumbuh di atas rata-rata karena adanya pemekaran dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Deli Serdang ke Kota Medan.

Tabel 2 : Rata-rata Laju Petumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/ Kota (persen)

Kabupaten / Kota	1961 - 1971	1971 - 1980	1980 - 1990	1990 - 2000
Kabupaten				
01. Nias	1,67	2,60	2,32	1,55
02. Mandailing Natal	-	-	1,94	1,60
03. Tapanuli Selatan ¹⁾	2,44 *)	2,07 *)	2,54	1,34
04. Tapanuli Tengah	3,06	2,30	2,52	1,37
05. Tapanuli Utara ²⁾	1,07 **)	1,01 **)	0,12	0,04
06. Toba Samosir	-	-	0,29	0,51
07. Labuhan Batu	3,51	4,70	2,97	1,47
08. Asahan	3,83	2,98	1,32	0,58
09. Simalungun	2,96	1,51	0,59	0,63
10. Dairi	2,97	3,00	1,37	0,58
11. Karo	2,14	2,06	1,64	0,99
12. Deli Serdang	3,99	-1,55	2,59	2,10
13. Langkat	4,32	3,37	1,47	1,14
Kota				
14. Sibolga	0,90	3,92	1,84	1,41
15. Tanjung Balai	1,45	2,45	9,95	2,11
16. Pem. Siantar	1,20	1,68	3,85	1,00
17. Tebing Tinggi	1,47	2,69	2,40	0,71
18. Medan	2,90	12,99	2,30	1,00
19. Binjai	2,87	2,72	9,05	1,68
SUMUT	2,95	2,60	2,06	1,20

Sumber : Sensus Penduduk 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, Kar tor BPS Sumatera Utara, diolah.

Catatan : Termasuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap (tuna wisma, awak kapal, penghuni perahu/rumah terapung, dan masyarakat terpencil).

Keterangan : *) Masih termasuk Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal

**) Masih termasuk Tapanuli Utara dan Toba Samosir

Pada periode 1990 – 2000, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Sumatera Utara sekitar 1,20 persen per tahun. Semua kabupaten/kota yang ada di Wilayah Pembangunan I memiliki laju pertumbuhan penduduk di atas rata-rata provinsi.

Sedangkan kabupaten/kota di Wilayah Pembangunan II memiliki laju pertumbuhan penduduk di bawah rata-rata provinsi.

Untuk Wilayah Pembangunan III, Kabupaten Deli Serdang dan Kota Binjai mengalami pertumbuhan penduduk di atas rata-rata. Sedangkan Kota Medan, Tebing Tinggi dan Kabupaten Langkat penduduknya tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan penduduk provinsi.

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Labuhan Batu dan Kota Tanjung Balai relatif tinggi dan berada di bawah rata-rata pertumbuhan penduduk Sumatera Utara. Di Wilayah Pembangunan IV, hanya di Kabupaten Asahan yang pertumbuhan penduduknya berada di bawah rata-rata provinsi. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.

3.3 Kondisi Ketenagakerjaan

Pada Tabel 3 terlihat angka pengangguran terbuka yang ada di Sumatera Utara menurut kabupaten dan kota. Secara keseluruhan angka pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara sebesar 4,47 persen, yang berarti sekitar 4,47 persen dari angkatan kerja belum bekerja atau masih mencari pekerjaan.

Tabel 3 : Angkatan Kerja (orang) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2001

Kabupaten/Kota	Bekerja	Mencari Kerja	Angkatan Kerja	TPT (%)
Kabupaten				
01. Nias	370.219	1.614	371.833	0,43
02. Mand. Natal	157.915	3.905	161.820	2,41
03. Tap. Selatan	324.669	6.018	330.687	1,82
04. Tap. Tengah	94.824	4.644	99.468	4,67
05. Tap. Utara	182.781	2.573	185.354	1,39
06. Toba Samosir	152.565	1.486	154.051	0,96
07. Labuhan Batu	317.573	15.029	332.602	4,52
08. Asahan	395.897	10.007	405.904	2,47
09. Simalungun	415.270	12.037	427.307	2,82
10. Dairi	157.850	2.552	160.402	1,59

Kabupaten/Kota	Bekerja	Mencari Kerja	Angkatan Kerja	TPT (%)
11. Karo	149.718	379	150.097	0,25
12. D. Serdang	797.051	39.283	836.334	4,70
13. Langkat	352.828	29.962	382.790	7,83
Kota				
14. Sibolga	25.758	2.403	28.161	8,53
15. Tanjung Balai	45.933	4.264	50.197	8,49
16. Pem. Siantar	82.901	7.189	90.090	7,98
17. Tebing Tinggi	42.770	4.700	47.470	9,90
18. Medan	661.012	71.048	732.060	9,71
19. Binjai	85.360	6.139	91.499	6,71
SUMUT	4.812.894	225.232	5.038.126	4,47

Sumber : SP1990, SP2000 dan Susenas 2001

Catatan : *) Termasuk Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Toba Samosir
SP1990 : Kondisi Akhir Oktober 1990

- 1) Penduduk 10 tahun keatas SP2000: Kondisi Akhir Juni 2000
2) Penduduk 15 tahun keatas Susenas 2001 : Kondisi Februari 2001

Beberapa kabupaten dan kota memiliki angka pengangguran terbuka yang relatif kecil dan di bawah rata-rata provinsi. Seperti di Wilayah Pembangunan I, Kabupaten Nias, Mandailing Natal dan Tapanuli Selatan memiliki angka pengangguran terbuka yang rendah, kecuali Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga. Demikian pula dengan dengan kabupaten yang ada di Wilayah Pembangunan II, kecuali Kota Pematang Siantar.

Seluruh kabupaten dan kota yang ada di Wilayah Pembangunan III, memiliki angka pengangguran yang relatif tinggi. Di Wilayah Pembangunan IV, hanya Kabupaten Asahan yang memiliki angka pengangguran terbuka di bawah rata-rata provinsi sedangkan yang lain relatif lebih tinggi.

Angka pengangguran terbuka paling rendah di Kabupaten Karo yang hanya 0,25 persen, di Nias sebesar 0,43 persen dan di Toba Samosir sekitar 0,96 persen. Tertinggi berada di Kota Tebing Tinggi dengan angka pengangguran mencapai 9,90 persen, di Medan sebesar 9,71 persen dan di Sibolga sekitar 8,53 persen.

Kalau dilihat dari pengangguran terbuka, angka pengangguran yang ada relatif rendah. Namun kalau diperhitungkan mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu atau setengah pengangguran (*underemployment*), maka angka tersebut menjadi sangat besar. Sebagai contoh, di Kabupaten Karo angka pengangguran sebesar 0,25 persen tetapi angka pengangguran mencapai 31,97 persen. Demikian pula dengan di Kabupaten Nias, angka penganggurannya mencapai 30,07 persen. Jumlah pengangguran terbuka dan setengah pengangguran (*underemployment*) di kabupaten dan kota dapat dilihat melalui Tabel 4.

Tabel 4 : Jumlah Pengangguran Terbuka dan Setengah Pengangguran Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2001

Kabupaten/ Kota	Pengangguran Terbuka	Setengah Pengangguran	Pengangguran
Kabupaten			
01. Nias	1.614	110.197	111.811
02. Mand. Natal	3.905	87.025	90.930
03. Tap. Selatan	6.018	172.070	178.088
04. Tap. Tengah	4.644	43.074	47.718
05. Tap. Utara	2.573	70.329	72.902
06. Toba Samosir	1.486	100.265	101.751
07. Labuhan Batu	15.029	109.616	124.645
08. Asahan	10.007	142.374	152.381
09. Simalungun	12.037	190.394	202.431
10. Dairi	2.552	87.944	90.496
11. Karo	379	47.612	47.991
12. D. Serdang	39.283	203.225	242.508
13. Langkat	29.962	130.910	160.872
Kota			
14. Sibolga	2.403	3.780	6.183
15. Tanjung Balai	4.264	12.274	16.538
16. Pem. Siantar	7.189	16.016	23.205
17. Tebing Tinggi	4.700	7.708	12.408
18. Medan	71.048	85.988	157.036
19. Binjai	6.139	18.342	24.481
SUMUT	225.232	1.639.143	1.864.375

Sumber : Susenas 2001

Catatan : Jumlah Penganggur = Pengangguran Terbuka + Setengah Pengangguran (penduduk bekerja dibawah 35 jam per minggu)

Pada daerah perkotaan, jumlah setengah pengangguran tidak begitu mencolok dibandingkan dengan pengangguran terbuka. Seperti halnya di Kota Tebing Tinggi dengan angka pengangguran terbuka mencapai 9,90 persen tetapi pengangguran secara keseluruhan hanya sebesar 26,14 persen yang berarti masih jauh di bawah Kabupaten Nias.

3.4 Kondisi Pendidikan

Dilihat dari persentase penduduk berusia di atas 10 tahun yang menamatkan pendidikannya, umumnya penduduk perkotaan yang menamatkan pendidikan Perguruan Tinggi (PT) di atas 1 persen. Demikian pula dengan Kabupaten Asahan, Simalungun dan Deli Serdang. Sedangkan kabupaten lainnya, rata-rata masih di bawah 1 persen dengan angka terendah berada di Kabupaten Mandailing Natal, Nias dan Langkat.

Persentase penduduk yang tidak pernah menamatkan Sekolah Dasar (SD) rata-rata Sumatera Utara mencapai 21,31 persen dengan angka tertinggi di Kabupaten Tapanuli dengan rasio 34,58 persen dan yang terendah berada di Kota Medan hanya sebesar 12,97 persen. Secara umum, keberhasilan pendidikan yang telah dicapai Provinsi Sumatera Utara relatif baik dengan semakin menurunnya angka tidak tamat SD dan bertambahnya angka tamatan perguruan tinggi.

Tabel 5 : Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2001

Kabupaten/Kota	BS	TTSD	Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan					
			SD	SLTP	SLTA	DI/ II	Ak. / DIII	PT
Kabupaten								
01 Nias	7.76	25.70	41.98	17.08	6.99	0.06	0.08	0.35
02 Mandailing Natal	0.78	29.53	41.73	17.71	9.25	0.05	0.64	0.31
03 Tapanuli Selatan	0.18	20.50	34.12	28.93	15.42	0.04	0.24	0.56

Kabupaten/Kota	BS	TISD	Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan						
			SD	SLTP	SLTA	DI/ II	Ak. / DIII	PT	
04 Tapanuli Tengah	3.86	34.58	30.41	17.91	11.92	0.27	0.40	0.65	
05 Tapanuli Utara	2.61	24.95	27.99	24.00	17.99	0.55	1.09	0.82	
06 Toba Samosir	4.21	23.02	27.28	25.12	18.46	0.64	0.80	0.46	
07 Labuhan Batu	4.05	28.83	32.17	17.95	15.53	0.38	0.46	0.64	
08 Asahan	5.55	28.13	33.02	17.51	13.76	0.47	0.55	1.02	
09 Simalungun	4.36	22.06	29.66	24.93	16.70	0.31	0.56	1.41	
10 Dairi	1.31	26.25	34.50	21.96	13.90	0.44	0.52	1.13	
11 Karo	2.26	19.58	34.06	24.47	17.98	0.40	0.68	0.57	
12 Deli Serdang	2.91	20.43	30.70	23.47	20.40	0.37	0.53	1.19	
13 Langkat	2.75	19.65	39.92	22.90	13.87	0.36	0.10	0.45	
Kota									
14 Sibolga	1.01	22.13	26.51	24.72	22.96	0.31	0.57	1.80	
15 Tanjung Balai	3.17	22.21	33.01	20.51	18.60	0.63	0.53	1.32	
16 Pematang Siantar	1.06	14.17	23.40	25.43	29.86	0.88	1.89	3.32	
17 Tebing Tinggi	1.64	13.65	28.80	24.54	26.42	0.84	1.40	2.71	
18 Medan	0.98	12.97	24.64	23.06	31.93	0.32	1.80	4.30	
19 Binjai	1.79	14.19	27.11	21.36	29.53	0.93	1.85	3.23	
Jumlah	2.91	21.31	31.52	22.33	19.24	0.36	0.77	1.57	

Sumber : Susenas 2001

Penduduk usia Sekolah Dasar yang tidak sedang bersekolah rata-rata di Sumatera Utara sekitar 2,28 persen. Angka partisipasi usia Sekolah Dasar terendah dijumpai di Kabupaten Tapanuli yang hanya sekitar 94,78 persen dan yang tertinggi di Kabupaten Toba Samosir yang mencapai 99,81 persen atau hanya sekitar 0,19 persen yang tidak bersekolah.

Tabel 6 : Partisipasi Sekolah Menurut Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur Tahun 2001

Kabupaten/Kota	7-12	13-15	16-18
Kabupaten			
01. Nias	96,52	74,42	34,59
02. Mand. Natal	99,21	86,57	55,60
03. Tap. Selatan ¹⁾	98,75	96,43	73,94
04. Tap. Tengah	94,78	81,72	63,61

Kabupaten/Kota	7-12	13-15	16-18
05. Tap. Utara ²⁾	98,23	98,54	89,56
06. Toba Samosir	99,81	96,25	81,73
07. Labuhan Batu	95,76	73,45	48,18
08. Asahan	98,24	82,72	56,39
09. Simelungun	97,29	90,35	71,66
10. Dairi	97,04	93,39	55,27
11. Karo	97,98	90,41	64,03
12. D. Serdang	98,33	91,57	63,51
13. Langkat	97,59	88,26	47,69
Kota			
14. Sibolga	96,47	84,76	69,96
15. Tanjung Balai	95,06	80,70	53,78
16. Pem. Siantar	98,63	92,72	84,00
17. Tebing Tinggi	98,61	94,80	73,98
18. Medan	97,62	93,60	73,79
19. Binjai	98,96	98,06	79,71
Sumut	97,72	89,19	63,67

Sumber : Susenas 2001

Dengan dicanangkannya pendidikan dasar 9 tahun, maka diharapkan partisipasi anak berusia hingga 15 tahun yang berada di bangku sekolah semakin tinggi. Dalam kenyataannya, rata-rata Sumatera Utara hanya sekitar 89,19 persen, dengan angka tersendah berada di Kabupaten Labuhan Batu dan tertinggi di Tapanuli Utara. Satu hal yang menonjol di Tapanuli Utara adalah angka partisipasi usia pendidika SLTP lebih tinggi dibandingkan dengan usia SD.

Sebagian besar mereka yang menamatkan SLTP melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya ke SMU atau ke SMK. Namun jumlah mereka semakin berkurang dibandingkan dengan total tamatan SLTP. Hal ini dapat dilihat dari angka partisipasi usia 16 – 18 tahun yang masih duduk di bangku sekolah rata-rata hanya sekitar 63,67 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian dari mereka ada yang sudah memasuki dunia kerja dengan tingkat pendidikan sekedarnya.

3.5 Kondisi Kemiskinan

Seperti diketahui secara umum bahwa kemiskinan terjadi karena rendahnya gaji atau upah yang diterima. Upah rendah karena tingkat produktivitas mereka rendah dan produktivitas rendah diakibatkan oleh pendidikan rendah. Demikian selanjutnya, sehingga rantai kemiskinan tersebut sulit untuk dapat diputuskan atau sering disebut dengan lingkaran kemiskinan (*vicious cycle*).

Tabel 7 : Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 1993-1999

Kabupaten/ Kota	Jumlah (000 orang)			Persentase		
	1993	1996*	1999*	1993	1996*	1999*
01. Nias	167,4	351,9	393,6	28,88	54,04	56,99
02. Mandailing Natal	-	-	-	-	-	-
03. Tapanuli Selatan ¹⁾	103,3	125,0	140,0	10,98	11,81	12,40
04. Tapanuli Tengah	39,5	49,1	54,5	18,62	20,47	21,06
05. Tapanuli Utara ²⁾	108,2	116,8	101,9	16,57	16,38	14,00
06. Toba Samosir	-	-	-	-	-	-
07. Labuhan Batu	82,4	72,0	150,0	11,19	8,61	16,94
08. Asahan	102,8	176,6	167,4	12,17	19,02	17,47
09. Simalungun	100,8	91,1	180,9	13,17	10,82	20,76
10. Dairi	60,6	42,8	48,4	22,87	14,72	16,06
11. Karo	40,2	22,6	14,4	16,20	8,19	5,02
12. Deli Serdang	121,8	102,9	201,6	7,65	5,74	10,46
13. Langkat	106,8	144,9	174,2	13,72	16,87	19,54
14. Sibolga	4,5	12,2	10,8	6,47	16,05	13,30
15. Tanjung Balai	12,2	5,7	7,8	11,68	4,94	6,66
16. Pematang Siantar	39,3	25,0	49,9	18,61	10,84	20,91
17. Tebing Tinggi	18,9	14,3	17,8	16,41	10,97	12,89
18. Medan	198,2	111,8	240,0	11,63	5,85	11,81
19. Binjai	24,6	11,1	19,4	13,36	5,34	8,75
SUMATERA UTARA	1.331,	1.475,	1.972,	13,3	13,2	16,7

Sumber : Susenas 2001

*) Angka Perbaikan

Kalau dilihat dari jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara dari tahun 1993 hingga 1996, kelihatannya terus meningkat namun persentasenya semakin kecil. Akibat krisis ekonomi yang terjadi di akhir 1997 dan tahun 1998, jumlah penduduk miskin Sumatera Utara terus meningkat demikian pula dengan persentasenya.

Tahun 1993, persentase penduduk miskin terbesar ada di Kabupaten Nias yang diikuti Dairi. Untuk tahun 1996, persentase penduduk miskin di Nias meningkat hampir dua kali lipat, sedangkan di Dairi justru mengalami penurunan sedangkan yang mengalami peningkatan cukup besar ada di Tapanuli Tengah.

Akibat pengaruh krisis ekonomi, di Kabupaten Karo persentase penduduk miskin menurun tajam hingga hanya tinggal 5,02 persen yang berarti terendah di Sumatera Utara. Di Kabupaten Nias, justru sebaliknya dan angkanya mencapai 56,99 persen yang berarti lebih dari setengah penduduknya adalah orang miskin. Untuk daerah perkotaan, selama periode yang sama perubahan penduduk miskin bervariasi, namun akibat krisis ekonomi, peningkatan persentase jumlah penduduk miskin hampir merata di semua kota, kecuali Kota Sibolga yang mengalami penurunan jumlah penduduk miskin.

BAB IV

HASIL PEMBANGUNAN EKONOMI SUMATERA UTARA

4.1 Produk Domestik Regional Bruto

Pendapatan per kapita penduduk Sumatera Utara terus mengalami kenaikan, dilihat dari PDRB perkapita atas dasar harga berlaku. Tahun 1996 besarnya Rp.2.578.532 dengan pendapatan tertinggi ada di Kota Medan yang mencapai Rp. 3 497.491. Beberapa daerah yang kurang beruntung memiliki tingkat pendapatan perkapita yang rendah, seperti Kabupaten Nias, Deli Serdang, Tapanuli Utara dan Kota Binjai.

Pada tahun 1998, pendapatan perkapita penduduk Sumatera Utara telah naik menjadi Rp. 4.534.125 dengan nilai tertinggi berada di Kabupaten Labuhan Batu yang mencapai Rp. 6.546.972, diikuti Kabupaten Asahan sebesar Rp. 5.846.225. Kabupaten Nias tetap merupakan daerah dengan pendapatan rata-rata perkapita penduduk paling rendah yang hanya Rp. 2.628.962, diikuti Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp. 2.845.693 dan Kota Binjai sebesar Rp. 2.960.

Hingga tahun 1999, pendapatan perkapita masyarakat Sumatera Utara rata-rata mencapai Rp.5.924.314. Untuk daerah kabupaten, hanya Asahan, Labuhan Batu dan Karo yang berada di atas rata-rata, sedangkan kabupaten lainnya lebih rendah dari rata-rata provinsi. Dilihat dari kota-kota yang ada, hanya Kota Binjai yang pendapatan perkapita penduduknya berada di bawah rata-rata pendapatan perkapita Sumatera Utara. Secara rinci tergambar dari Tabel 8 berikut.

Tabel 8 : Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 1996-2000 (Rupiah)

Kabupaten/Kota	1996	1997	1998	1999	2000
Kabupaten					
01. Nias	1.585.387	1.772.560	2.628.962	2.978.463	3.362.686
02. Mandailing Natal	-	1.980.453	3.067.343	3.265.579	3.500.877
03. Tapanuli Selatan	3.176.247*)	2.672.402	4.203.527	4.575.898	4.947.730
04. Tapanuli Tengah	2.036.776	2.162.151	3.205.427	3.702.983	3.950.855
05. Tapanuli Utara	1.855.531	2.173.419	3.354.328	3.974.990	4.747.656
06. Toba Samosir	2.020.929	2.286.517	3.157.982	3.840.683	4.018.557
07. Labuhan Batu	2.929.535	4.858.045	6.546.972	7.322.988	7.988.449
08. Asahan	3.310.180	3.860.380	5.846.225	7.274.061	8.737.866
09. Simalungun	2.517.886	2.632.522	4.063.875	4.296.713	4.141.017
10. Dairi	2.005.130	2.431.427	3.550.376	3.919.442	4.326.130
11. Karo	2.679.494	3.088.521	4.777.053	5.688.651	6.162.864
12. Deli Serdang	1.704.907	1.892.975	2.845.693	3.249.492	3.616.830
13. Langkat	2.592.440	2.682.358	4.403.058	4.601.117	5.246.765
Kota					
14. Sibolga	3.272.726	3.573.060	4.587.888	5.133.816	5.842.076
15. Tanjung Balai	3.260.384	3.452.977	4.752.285	5.754.670	6.252.263
16. Pematang Siantar	3.455.852	3.909.248	5.552.330	6.395.416	6.997.472
17. Tebing Tinggi	3.170.013	3.480.492	4.860.335	5.407.522	5.801.985
18. Medan	3.497.491	3.803.215	5.213.743	5.694.798	6.223.267
19. Binjai	1.959.468	2.088.755	2.960.097	3.361.913	3.876.022
SUMATERA UTARA	2.578.532	3.076.416	4.534.125	5.476.169	5.924.311

Sumber : PDRB Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, berbagai tahun terbitan

*) Termasuk Kabupaten Mandailing Natal

Sebagai hasil pembangunan ekonomi, selain besarnya pendapatan perkapita, juga perlu diperhatikan pertumbuhan dan distribusi antar sektor. Selama tahun 1997, PDRB Sumatera Utara mengalami pertumbuhan yang positif yaitu, sekitar 5,70 persen. Namun akibat krisis ekonomi yang terjadi, maka di tahun 1998 terjadi

penurunan sekitar 10,90 persen dan di tahun-tahun berikutnya tumbuh kembali dengan laju pertumbuhan yang relatif rendah.

Tabel 9 : Laju Pertumbuhan PDRB Sumatera Utara Atas Harga Konstan 1993 Menurut Lapangan Usaha Tahun 1997-2001 (Persen)

Sektor	1997	1998	1999	2000 ^{*)}	2001 ^{**)}
1. Pertanian	8,98	2,10	5,69	4,76	2,32
2. Pert. dan Penggalian	(37,95)	(17,78)	(2,69)	7,09	1,14
3. Industri Pengolahan	3,77	(16,56)	(0,08)	3,54	4,52
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	38,53	4,26	3,98	10,30	8,41
5. Bangunan	8,74	(16,17)	1,41	2,88	1,33
6. Perd. Hotel dan Restoran	5,53	(17,86)	3,41	4,08	5,34
7. Trans. dan Komunikasi	7,37	(17,68)	3,16	7,72	6,17
8. Jasa Keuangan	5,56	(14,57)	(1,80)	9,68	2,24
9. Jasa - jasa	7,76	(8,81)	0,55	2,70	1,78
SUMATERA UTARA	5,70	(10,90)	2,59	4,83	3,64

Sumber : Sumatera Utara dalam Angka, berbagai tahun terbitan, diolah

Catatan: *) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Sektor pertanian, dan utiliti (listrik, gas dan air minum) tetap mengalami pertumbuhan selama periode 1997 sampai dengan 1999. Secara keseluruhan, PDRB Sumatera Utara mengalami penurunan di tahun 1998, dan kembali naik di tahun 1999, kecuali sektor penggalian, industri pengolahan dan jasa keuangan.

PDRB Sumatera Utara atas dasar harga berlaku sampai dengan tahun 2001 masih didominasi sektor pertanian dengan nilai Rp. 24.151,05 milyar atau sekitar 30,94 persen. Sedangkan jika dilihat atas dasar harga konstan tahun 1993, jumlahnya sebesar Rp.7.812,51.

Tabel 10 : Perkembangan PDRB Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 1997-2001 (Milyar Rupiah)

Sektor	1997	1998	1999	2000 [*]	2001 ^{**}
1. Pertanian	8.743,19	13.374,80	19.536,50	21.183,90	24.151,05
2. Pert. & Penggalian	469,10	817,19	843,00	1.060,91	1.208,46
3. Industri Pengolahan	9.073,37	14.915,46	16.809,64	18.175,31	20.497,29
4. Listrik, Gas & Air Minum	343,03	423,33	496,61	634,74	726,72
5. Bangunan	1.433,01	2.027,40	2.286,84	2.729,20	3.121,53
6. Perdagangan, Hotel & Rest.	6.688,50	10.367,98	12.229,43	13.307,55	15.264,45
7. Trans. & Komunikasi	2.752,20	3.057,64	3.337,00	3.863,92	4.863,62
8. Jasa Keuangan	2.297,19	2.462,39	2.489,41	2.824,97	3.251,58
9. Jasa-Jasa lain	2.206,68	3.259,78	3.929,13	4.431,87	4.985,57
PDRB	34.006,27	50.705,97	61.957,56	68.212,37	78.070,27

Sumber : Sumatera Utara dalam Angka, berbagai tahun terbitan

Catatan : *) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Sektor terbesar kedua adalah industri pengolahan dengan nilai riil (ADH 1993) sebesar Rp. 5.395,50 dan nilai nominalnya (ADH berlaku) sebesar Rp. 20.497,29 milyar. Secara relatif kontribusi sektor ini terhadap pembentukan output daerah sekitar 26,25 persen. Sektor terbesar ketiga adalah perdagangan, hotel dan restoran dengan kontribusi sekitar 19,55 persen dan nilai riil-nya sebesar Rp. 4.375,81 milyar sedangkan nilai nominalnya Rp. 15.264,45 milyar. secara rinci dapat dilihat melalui Tabel 10 – 12.

Sektor yang paling kecil sumbangannya terhadap pembentukan output Sumatera Utara adalah listrik, gas dan air minum yang hanya sekitar 0,93 persen dengan nilai nominal sebesar Rp. 726,72 milyar dan nilai riil-nya sebesar Rp. 426,59 milyar.

Tabel 11 : Distribusi PDRB Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 1997-2001 (Persen)

Sektor	1997	1998	1999	2000 ^{*)}	2001 ^{**)}
1. Pertanian	25,71	26,38	31,53	31,06	30,94
2. Pertambangan & Penggalian	1,38	1,61	1,36	1,56	1,55
3. Industri Pengolahan	26,68	29,42	27,13	26,65	26,25
4. Listrik, Gas & Air Minum	1,01	0,83	0,80	0,93	0,93
5. Bangunan	4,21	4,00	3,69	4,00	4,00
6. Perdagangan, Hotel & Rest.	19,67	20,45	19,74	19,51	19,55
7. Transportasi & Komunikasi	8,09	6,03	5,30	5,66	6,23
8. Jasa Keuangan	6,76	4,86	4,02	4,14	4,10
9. Jasa-Jasa lain	6,49	6,43	6,34	6,50	6,39
TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Sumatera Utara dalam Angka, berbagai tahun terbitan

Catatan : *) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Sektor kedua terkecil adalah kedua adalah penggalian dan pertambangan sekitar 1,55 persen dengan nilai nominal sebesar Rp.1.208,46 milyar. Tetapi dilihat dari PDRB atas dasar harga konstan tahun 1993 nilai lebih kecil dibanding sektor utiliti yaitu Rp.322,09 milyar.

Tabel 11 : Perkembangan PDRB Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1997-2001 (Milyar Rupiah)

Sektor	1997	1998	1999	2000 [*]	2001 ^{**}
1. Pertanian	6.754,53	6.896,12	7.288,31	7.635,24	7.812,51
2. Pert. & Penggalian	371,66	305,58	297,38	318,46	322,09
3. Industri Pengolahan	5.980,10	4.989,74	4.985,86	5.162,33	5.395,50
4. Listrik, Gas & Air Minum	329,03	343,06	356,73	393,48	426,59
5. Bangunan	1.134,57	951,16	964,61	992,44	1.005,64
6. Perdagangan, Hotel & Rest.	4.699,08	3.859,89	3.991,37	4.154,11	4.375,81
7. Trans. & Komunikasi	2.200,18	1.811,30	1.868,58	2.012,82	2.136,98
8. Jasa Keuangan	1.799,39	1.537,20	1.509,56	1.655,68	1.692,85
9. Jasa-Jasa lain	1.796,86	1.638,64	1.647,68	1.692,09	1.722,24
PDRB	25.065,40	22.332,69	22.910,08	24.016,65	24.890,21

Sumber : Sumatera Utara dalam Angka, berbagai tahun terbitan

PDRB Sumatera Utara mengalami pertumbuhan yang positif yaitu, sekitar 5,70 persen. Namun akibat krisis ekonomi yang terjadi, maka di tahun 1998 terjadi penurunan sekitar 10,90 persen dan di tahun-tahun berikutnya tumbuh kembali dengan laju pertumbuhan yang relatif rendah.

Sektor pertanian, dan utiliti (listrik, gas dan air minum) tetap mengalami pertumbuhan selama periode 1997 sampai dengan 1999. Secara keseluruhan, PDRB Sumatera Utara mengalami penurunan di tahun 1998, dan kembali naik di tahun 1999, kecuali sektor penggalian, industri pengolahan dan jasa keuangan.

Seperti diketahui secara umum bahwa kemiskinan terjadi karena rendahnya gaji atau upah yang diterima. Upah rendah karena tingkat produktivitas mereka rendah dan produktivitas rendah diakibatkan oleh pendidikan rendah. Demikian selanjutnya, sehingga rantai kemiskinan tersebut sulit untuk dapat diputuskan atau sering disebut dengan lingkaran kemiskinan (*vircious cyrcle*).

Akibat krisis ekonomi yang terjadi di akhir 1997 dan tahun 1998, jumlah penduduk miskin Sumatera Utara terus meningkat demikian pula dengan persentasenya. Di Kabupaten Karo persentase penduduk miskin menurun tajam pada periode tersebut, dan di Kabupaten Nias justru sebaliknya, lebih dari setengah penduduknya adalah orang miskin. Untuk daerah perkotaan, selama periode yang sama perubahan penduduk miskin bervariasi, namun akibat krisis ekonomi, peningkatan persentase jumlah penduduk miskin hampir merata di semua kota, kecuali Kota Sibolga yang mengalami penurunan jumlah penduduk miskin.

Pendapatan per kapita penduduk Sumatera Utara terus mengalami kenaikan, dilihat dari PDRB perkapita atas dasar harga berlaku. Tahun 1996 besarnya Rp.2.578.532 dengan pendapatan tertinggi ada di Kota Medan yang mencapai Rp. 3 497.491. Beberapa daerah yang kurang beruntung memiliki tingkat pendapatan perkapita yang rendah, seperti Kabupaten Nias, Deli Serdang, Tapanuli Utara dan Kota Binjai.

Hingga tahun 1999, pendapatan perkapita masyarakat Sumatera Utara rata-rata mencapai Rp.5.924.314. Untuk daerah kabupaten, hanya Asahan, Labuhan Batu dan Karo yang berada di atas rata-rata, sedangkan kabupaten lainnya lebih rendah dari rata-rata provinsi. Dilihat dari kota-kota yang ada, hanya Kota Binjai yang pendapatan perkapita penduduknya berada di bawah rata-rata pendapatan perkapita Sumatera Utara.

Sebagai hasil pembangunan ekonomi, selain besarnya pendapatan perkapita, juga perlu diperhatikan pertumbuhan dan distribusi antar sektor. Selama tahun 1997,

BAB V

KESIMPULAN

Laju pertumbuhan penduduk Sumatera Utara mengalami penurunan dibandingkan dengan pertumbuhan pada dekade sebelumnya. Jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang merupakan yang terbesar, dan daerah yang memiliki jumlah penduduk terkecil adalah Kota Sibolga.

Di WP I dan WP II angka pengangguran terbuka relatif kecil dan di bawah rata-rata provinsi. Sedangkan di WP III dan WP IV angka pengangguran terbuka relatif, di atas rata-rata Sumatera Utara. Namun kalau diperhitungkan mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu atau setengah pengangguran (*underemployment*), maka angka tersebut menjadi sangat besar. Di Kabupaten Karo angka pengangguran terbuka paling sedikit tetapi angka pengangguran sangat besar, demikian pula dengan di Kabupaten Nias. Pada daerah perkotaan, jumlah setengah pengangguran tidak begitu mencolok dibandingkan dengan pengangguran terbuka.

Dilihat dari persentase penduduk berusia di atas 10 tahun yang menamatkan pendidikannya, umumnya penduduk perkotaan yang menamatkan pendidikan Perguruan Tinggi (PT) di atas 1 persen. Sedangkan kabupaten lainnya, rata-rata masih di bawah 1 persen dengan angka terendah berada di Kabupaten Mandailing Natal, Nias dan Langkat.

Angka partisipasi usia Sekolah Dasar terendah dijumpai di Kabupaten Tapanuli Tengah dan yang tertinggi di Kabupaten Toba Samosir. Dengan dicanangkannya pendidikan dasar 9 tahun, maka diharapkan partisipasi anak berusia hingga 15 tahun yang berada di bangku sekolah semakin tinggi. Tetapi kenyataannya, masih banyak dalam usia tersebut yang tidak masuk dalam partisipasi sekolah. Dan sebagian dari mereka yang menamatkan SLTP tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Effendi, 1996. "Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan", dalam *Prisma*, Jakarta.
- Arsyad, Lincoln, 1999. *Ekonomi Pembangunan*, edisi keempat, STIE YKPN, Yogyakarta.
- Azis, Iwan Jaya, 1994. *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia*, LPFE-UI, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2001. *Sumatera Utara dalam Angka 2000*.
_____, berbagai tahun terbitan. *Pendapatan Regional Kabupaten*, Medan.
_____, berbagai tahun terbitan, *Sumatera Utara dalam Angka*, Medan.
- Bank Indonesia Cab. Medan, 2001. *Statistik Keuangan Daerah*, Medan.
- Djamin, Zulkarnain, 1995. *Struktur Perekonomian dan Strategi Pembangunan Indonesia*, UI-Press, Jakarta.
- Dumairy, 1995. *Evaluasi Kebijakan Pemerintah Menanggulangi Masalah Kemiskinan dan Kesenjangan, Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Hanafiah, T., 1982. *Pendekatan Wilayah dan Pembangunan Pedesaan*, Fakultas Pertanian IPB, Bogor.
- Hasibuan, Nurimansjah, 1993. *Pemerataan dan Pembangunan Ekonomi : Teori dan Kebijakan*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Ikhsan, Mohammad dan Basri, M. Chatib, 1991. "Investasi Swasta dan Pemerintah; Subsidi Atau Komplementer ? : Kasus Indonesia", dalam *Ekonomi Keuangan Indonesia (EKI)*, Vol. 39 No. 4, Jakarta.
- Irawan dan M. Suparmoko, 1992. *Ekonomika Pembangunan*, BPFE, Yogyakarta.
- Kawashima Tasuhiko, Akita Takahiro, Soedibyo dan Soeroso, 1989. *Pembangunan Ekonomi Daerah, Pembangunan Ekonomi Indonesia, Masalah dan Analisis*, UI-Press, Jakarta.
- Kunarjo, 1996. *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*, UI-Press, Jakarta.
- Majidi, Nasyith, 1997. "Anggaran Pembangunan dan Ketimpangan Ekonomi Antar Daerah", dalam *Prisma*, Vol. IV, Tahun ke XVI, LP3ES, Jakarta.
- Mountjoy Alan, B., 1983. *Industrialisasi dan Négera-Negera Dunia Ketiga*, Bina Aksara, Jakarta.
- Pamungkas, S.B., 1995. *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia, Suatu Evaluasi Atas Kebijakan Pembangunan Pemerintah, Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Salim, Emil, 1976. *Masalah Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Cetakan Ketiga LPFE-UI, Jakarta.

- Sjafrizal, 1997. "Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat", dalam *Prisma* Vo. IV Tahun ke XVI, LP3ES, Jakarta.
- Soetrisno Lukman, 1990, "Ketimpangan Pembangunan, Suatu Tinjauan Sosial Budaya", dalam *Agro Ekonomi*, No. 2 Th XI, Yayasan Agro Ekonomi, Yogyakarta.
- Sukirno, Sadono, 1976. *Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah*, LPFE-UI, Jakarta.
- _____, 1985. *Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*, LPFE-UI, Jakarta.
- Sumodiningrat, Gunawan, 1996. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, Bina Rena Pariwisata, Jakarta.
- Todaro, Michael P., 1998. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Edisi Ke-6, Erlangga, Jakarta.
- Uppal, J.S. and Handoko, Budiono Sri, 1986. "Regional Income Disparities in Indonesia", dalam *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. XXXIV, No. 3, Jakarta.
- Urip, Sunaryo, 1995. *Tingkat Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah, Analisis Kesenjangan Antar Wilayah*, BPS, Jakarta.